

Kerjasama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar

Novayanti Sopia Rukmana, Gita Susanti

Jurusan Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai;
Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
novasopiaa@yahoo.com

Abstrak

Kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public Private Partnership*) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir dan pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS membawa dampak baik dan saling menguntungkan. (2) Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.

Kata kunci: Public Private Partnership, Penentuan Kontrak Kemitraan, Pengelolaan parkir.

Abstract

Public private partnership (Public Private Partnership) is viewed essential to meet the availability of infrastructure and improvement of the service of the basic needs of the community are included in the management of the parking lot. The aim of the study was to observe how the contract in partnership and implementation of parking management between DR.Wahidin Sudirohusodo hospital and PT ISS was determined. This research employed qualitative approach. Data were collected through observation, interviews and documentation of informants directly involved in the implementation of these activities, and analyzed with reduction, presentation, and conclusion. The results of the research indicated that: (1) Determination of the parking management contract in partnership between the department DR Wahidin Sudirohusodo Hospital and PT ISS brought good impact and mutual benefit between the parties involved. (2) The implementation of parking management partnerships between DR Wahidin Sudirohusodo Hospital and PT ISS had not run optimally.

Keywords: Public Private Partnership, Partnership contract determination, Parking management.

I. PENDAHULUAN

Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dewasa ini telah menjadi *trend* atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat (*civil society*).

Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang ditawarkan oleh Osborne (1992), adalah konsep kemitraan pemerintah dan swasta. Pendekatan Kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public Private Partnership*) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia maka keterlibatan sektor privat penting dalam urusan publik untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat salahsatunya adalah urusan pengelolaan persampahan yang sering menjadi masalah di kota-kota besar. Parente (2006) mengartikan *Public Private Partnerships* (PPPs) merupakan suatu persetujuan atau kontrak, antara kesatuan masyarakat yang diwakili oleh pemerintah dengan sektor swasta untuk menyediakan layanan publik.

Permasalahan perparkiran yang terjadi di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo yang dikelola oleh perusahaan swasta yaitu PT ISS adalah kondisi perparkiran yang masih belum memadai, ini bisa dilihat dari lahan parkir yang masih sangat sempit jika kemudian dibandingkan dengan volume kendaraan yang datang dan memarkirkan kendaraanya.

Kondisi fisik lahan parkir yang juga sudah banyak berlubang menyebabkan

ketidakteraturan pengunjung dalam memarkirkan kendaraanya. Masalah keamanan dan tarif parkir yang terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan juga menjadi salah satu sorotan dalam perparkiran di rumah sakit wahidin. RSUP DR Wahidin Sudirohusodo selaku rumah sakit bertaraf internasional harusnya mampu menyediakan kondisi perparkiran yang dapat menampung semua kendaraan yang datang berkunjung ke rumah sakit, menjamin keamanan kendaraan serta kenyamanan pengunjung dalam memarkirkan kendaraanya.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penentuan kontrak dalam pengelolaan parkir dan pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo.

II. Kajian Literatur

Beberapa penelitian mengenai aplikasi *Public Privat Partnership* di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Zulfan (2013) bertujuan untuk menganalisis kemitraan dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Makassar antara pemerintah kota Makassar dan PT Gikoko Kogyo. Studi ini menyimpulkan pelaksanaan kemitraan antara pemerintah kota Makassar dan PT Gikoko Kogyo belum efektif dalam mengatasi masalah persampahan di TPA Tamangapa dilihat dari belum maksimalnya. Menurut Zulfan (2013), kemitraan ini hanya mampu melakukan pengurangan efek rumah kaca dan pelestarian lingkungan dan mengurangi bau sampah namun belum bisa mengatasi masalah persampahan secara keseluruhan. Studi selanjutnya terkait dengan aplikasi *public privat partnership* juga dilakukan oleh Chairuddin (2012) yang fokus pada skema kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan pihak swasta. Menurut Chairuddin (ibid), pemahaman tentang distribusi risiko terutama di dalam pendistribusian risiko diantara para pihak yang bekerjasama menjadi suatu hal yang krusial. Dalam pendistribusian risiko tersebut sangat diperlukan *state of the art* dalam

mengidentifikasi risiko sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikelola dengan sebaik-baiknya (Ibid).

Penelitian lain mengenai *public privat partnership* di Indonesia adalah Muthu Saily (2012) yang menganalisis kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan pelayanan jasa transportasi laut (Ferry penyeberangan) di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisa kualitatif. Menurut Muthu (ibid) kerjasama yang dilakukan ini memberikan manfaat yang positif bagi Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tetapi kerjasama ini belum sepenuhnya merupakan suatu kemitraan (kerjasama kolaboratif). Ini dapat dilihat dari ciri kemitraan yang belum semuanya sesuai dengan kerjasama yang dilakukan. Sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan dari kerjasama itu sendiri (ibid).

Berdasarkan berbagai studi yang menganalisis pelaksanaan *public privat partnership* di Indonesia tersebut, secara umum memperlihatkan kemitraan yang sangat rentan dengan kegagalan dalam mencapai kinerja yang baik sesuai harapan sebelumnya. Studi ini dilakukan untuk ikut memberikan kontribusi pengembangan *public privat partner ship* dengan perspektif teori pilihan rasional dalam pelaksanaan pelayanan publik di salah satu rumah sakit di Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pilihan dari Coleman (1994) untuk menganalisis aplikasi konsep PPP di pengelolaan parkir RS Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Lebih lanjut Coleman (Ibid;166-180) menjelaskan bahwa ide sentral dari pilihan yang rasional teori adalah bahwa "orang bertindak rasional untuk memenuhi preferences, atau untuk memaksimalkan utilitas". Coleman (Ibid) menawarkan delapan element dalam *rational choice*, empat dari paham neoklasik ekonomi dan empat dari paham sosiologi.

Dalam pengambilan keputusan yang rasional March (1999), menawarkan model rasionalitas sederhana dalam pengambilan keputusan, yang meliputi: (1) Pengetahuan alternatif: menyadari serangkaian tindakan

alternatif yang pembuatan keputusan. (2) Pengetahuan tentang konsekuensi: menyadari konsekuensi dari tindakan dalam pembuatan keputusan. Elemen yang ke(3) konsisten : dalam pembuatan keputusan memiliki nilai-nilai yang konsisten dalam membandingkan alternatif dan konsekuensi. Dan elemen ke(4) Keputusan aturan: pembuatan aturan dalam pengambilan keputusan yang berdasar pada preferensi dan konsekuensi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi Penelitian di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai rumah sakit Pemerintah yang bekerja sama dengan Perusahaan Swasta dalam pengelolaan parkir. Desain riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus tipe eksplanatif. Desain dan strategi riset yang digunakan ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai kerja sama pemerintah swasta (atau publik privat partnership) dalam pengelolaan parkir di Kota Makassar. dengan estimasi waktu pelaksanaannya daribulan April - Juni 2015.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu yakni dengan informan terkait langsung dalam kegiatan pengelolaan perparkiran, diantaranya: daripihak RSUP DR Wahidin Sudirohusodo yaitu, Direktur Umum dan Operasional, Direktur Keuangan, Kepala Bagian Humas, Kasubag Hukum dan kemitraan dan dari pihak PT ISS yaitu, Koordinator wilayah dan Koordianator area Parkir di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo.

Semua informan yang disebutkan diwawancarai secara mendalam dan berbagai dokumen seperti regulasi, laporan aktivitas terkait pelaksanaan program dikumpulkan untuk menunjang data penelitian ini. Studi ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penentuan Kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir

Latar belakang RSUP DR Wahidin Sudirohusodo memihak ketiga kan pengelolaan parkirnya adalah bahwa pengelolaan perparkiran ini bukan menjadi fokus dari RSUP DR Wahidin Sudirohusodo namun perparkiran ini merupakan penunjang dari pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit wahidin dan dengan memihak ketiga kan pengelolaan parkirnya RSUP DR Wahidin tidak lagi menyediakan sumberdaya manusia untuk mengelola perparkiran serta tidak menyediakan modal yang besar untuk mengelola perparkiran karena ketika bekerja sama dengan pihak swasta penyediaan sumberdaya manusia, finansial serta infrastruktur sudah menjadi tanggung jawab pihak swasta.

Tahapan tahapan dalam penentuan kontrak kerjasama di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo yaitu, RSUP DR Wahidin Sudirohusodo membuka proses pelelangan kepada perusahaan swasta, melakukan tendering, membentuk tim seleksi dan evaluasi kemitraan kerja sama yang akan memeriksa dan menelaah profil perusahaan yang akan dijadikan sebagai mitra kerja., kemudian selanjutnya kasubag hukum dan kemitraan dengan berbagai pertimbangan mengusulkan kepada Direksi. Selanjutnya diadakan rapat dewan direksi untuk menentukan dan memutuskan perusahaan yang akan menjalin kerja sama tersebut. Namun yang terjadi di lapangan tidak demikian, PT ISS sebagai perusahaan swasta yang mengelola perparkiran tersebut tidak melewati tahapan tahapan dalam penentuan kontrak melainkan penunjukan secara langsung.

Penentuan PT ISS sebagai perusahaan swasta yang mengelola perparkiran di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo ditentukan melalui rapat direksi berdasarkan rekomendasi dari kasubag hukum dan kemitraan. Rekomendasi ini didasarkan atas pertimbangan pada pengalaman kerja PT ISS, sistem transparansi serta penghargaan penghargaan yang telah diraih oleh PT ISS.

Pelaksanaan Kemitraan Dalam Pengelolaan Parkir

Aspek ekonomi atau pembagian keuntungan dalam pelaksanaan kemitraan antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS dalam pengelolaan parkir dapat kita lihat dari unsur benefitnya. Berdasarkan Tabel.1 Bagi Hasil Atas Laba Operasional antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS yang Penulis lampirkan dapat dilihat bahwa pembagian laba operasional yang didapatkan oleh RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan namun tidak secara signifikan. Misalnya laba Operasional dari bulan Maret 2015 sebanyak Rp.65.633.438 turun menjadi 49.605.063 pada bulan April 2015. Besaran keuntungan yang didapatkan didasarkan pada pendapatan perbulan dalam pengelolaan parkir. begitupun dengan PT ISS yang besaran keuntungannya didasarkan pada pembagian laba operasional yaitu 70% untuk RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dan 30% untuk PT ISS.

Adapun manfaat yang diperoleh oleh RSUP DR Wahidin Sudirohusodo yaitu (1) RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dapat melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas perparkiran serta pengelolaan parkir yang teratur. (2) Pemerintah dapat melakukan penghematan pengeluaran biaya dalam menyediakan fasilitas perparkiran. Manfaat yang didapatkan PT ISS yaitu: (1) Memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan masing-masing. Dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan keuntungan profit kepada kedua belah pihak. (2) Memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan masing-masing. Dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan keuntungan profit kepada kedua belah pihak.

Tanggung jawab dan kewajiban RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS dalam pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir tercantum dalam MOU. Salah satu tanggung jawab dari PT ISS selaku pengelola perparkiran adalah melakukan pemeliharaan dan perbaikan di lokasi parkir, namun

berdasarkan hasil penelitian masih banyaknya lahan parkir yang berlubang dan tidak dilakukan perbaikan. Sumber daya manusia yang dipekerjakan pada lokasi parkir RSUP DR Wahidin Sudirohusodo merupakan karyawan yang disediakan oleh PT ISS dengan jumlah 42 karyawan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam MOU antara kedua belapihak. Jumlah 42 orang ini dinilai belum cukup melihat banyaknya kendaraan yang harus diatur serta sempitnya lahan parkir dengan volume kendaraan yang cukup banyak menjadi alasan untuk mengharuskan adanya penambahan sumber daya manusia.

Luas lahan parkir di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo yang sangat sempit menjadi kendala dalam pengelolaan perparkiran ini. Luas lahan parkir tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang setiap harinya datang untuk parkir. Tarif parkir yang diberlakukan oleh PT ISS berdasarkan MOU antara kedua belapihak. Namun dalam realisasinya banyak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang mengeluhkan tarif parkir yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan.

Diskusi Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penentuan kontrak dalam pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS membawa dampak yang baik. Hal ini bisa dilihat dari Keputusan untuk memihak ketigakan pengelolaan parkir kepada pihak swasta merupakan keputusan yang tepat karena dengan kerja sama ini dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak. Dari segi penentuan Penentuan PT ISS sebagai mitra kerja yang tidak melewati proses tendering tetapi penunjukan secara langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak RSUP DR Wahidin Sudirohusodo bahwa semua kerja sama kemitraan harus melewati proses tendering dan seleksi oleh tim evaluasi kemitraan. March (1999) yang menjelaskan tentang adanya model rasional dalam pengambilan keputusan yaitu : menyadari serangkaian tindakan

alternatif dalam pembuatan keputusan, menyadari konsekuensi dari tindakan dalam pembuatan keputusan, kemudian dalam pembuatan keputusan memiliki nilai-nilai yang konsisten dalam membandingkan alternatif dan konsekuensi serta pembuatan aturan dalam pengambilan keputusan yang berdasar pada preferensi dan konsekuensi. Berdasarkan teori model rasional dalam pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dalam mengambil keputusan pengelolaan parkir yang tidak melewati tahapan-tahapan yang menjadi ketentuan pihak RSUP Wahidin Sudirohusodo tidak rasional.

Berdasarkan teori dari *Rational choice* (pilihan rasional), dengan menggunakan metode-metode ekonomi, maka akan bisa dijelaskan mengapa seseorang, atau sekelompok orang lebih memilih perusahaan A dibanding perusahaan B. Seseorang atau sekelompok orang tersebut memiliki kepentingan, dan mereka dihadapkan pada pilihan perusahaan A atau perusahaan B. Setelah dibandingkan dan dipertimbangkan, orang atau sekelompok orang tersebut berkesimpulan bahwa kepentingan mereka akan lebih terakomodasi jika perusahaannya A berkuasa, dari pada jika perusahaan B yang berkuasa. Sama halnya dengan RSUP DR Wahidin Sudirohusodo yang memilih PT ISS sebagai mitra kerja telah didasarkan pada analisis tentang alternatif-alternatif lain sebelum mengambil keputusan bermitra dengan PT ISS. Pelaksanaan kemitraan perparkiran di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo belum maksimal dalam pengelolaannya. Dalam pelaksanaan kerja sama ini memang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak namun kurang memperhatikan kenyamanan pasien. Ini bisa dilihat dari Kondisi lahan yang sangat sempit tidak mampu menampung semua kendaraan yang akan parkir yang merupakan kendaraan pegawai, dokter serta pasien serta pengunjung rumah sakit lainnya. Selanjutnya tarif parkir yang diberlakukan terkadang tidak sesuai dengan ketentuan tarif parkir yang telah disepakati secara bersama-sama antara pihak RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT

ISS, serta kurangnya jaminan kendaraan bagi pengunjung.

Dalam *New public management* mekanisme pasar digunakan dalam terminologi di sektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi pemerintah dengan pelanggannya (*customers*) dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka dunia pasar (*market place*). Dengan mentransformasikan kinerja pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti atau mereform kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan (*rule-based*) dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat (*authority-driven processes*) menjadi orientasi pasar (*market-based*), dan dipacu untuk berkompetisi sehat (*competition-driven tactics*).

Dalam konsep New Public Management semua pimpinan (manajer) didorong untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi melakukan “rowing” menyapu bersih semua pekerjaan. Melainkan mereka melakukan “steering” membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, mengarahkan yang strategis saja. Dengan demikian, kunci dari New Public Management adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program publik.

Secara teoritis, manajer ataupun pimpinan didorong untuk menemukan cara baru yang lebih inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal misalnya dengan melakukan privatisasi terhadap fungsi fungsi pemerintahan. Pimpinan tidak lagi melakukan rowing atau menyapu bersih semua pekerjaan melainkan melakukan steering atau membatasi pekerjaan atau fungsi pengendalian, memimpin dan mengarahkan yang strategis saja. Dalam konsep *New Public Management* Organisasi publik dituntut untuk mengadopsi manajemen sektor swasta serta mengembangkan inisiatif pengaturan sistem seperti deregulasi, privatisasi dan kontrak manajemen. Ketidakmampuan RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dalam mengelola perparkirannya sendiri berdampak pada

pemberian kewenangan kepada pihak swasta untuk mengelola perparkiran di rumah sakit wahidin. Keputusan RSUP DR Wahidin Sudirohusodo untuk memihak ketetapan pengelolaan parkirnya berdampak baik terhadap RSUP DR Wahidin Sudirohusodo.

PT ISS sebagai mitra kerja tidak melalui proses tendering melainkan penunjukan secara langsung oleh pihak RSUP DR Wahidin Sudirohusodo. Ini jelas tidak sesuai dengan aturan yang sebelumnya dikemukakan oleh pihak RSUP DR Wahidin Sudirohusodo yang menjelaskan ada beberapa tahapan dalam pemilihan perusahaan swasta sebagai mitra kerja. Secara teoritis, rasionalitas terjadi ketika seseorang pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Pemilihan sasaran alternatif harus dipikirkan oleh pembuat keputusan sebagai sebuah proses yang menyangkut pemilihan atau pengambilan sebuah keputusan. Penentuan PT ISS sebagai mitra kerja dari RSUP DR Wahidin Sudirohusodo yang tidak melalui tahapan dalam melakukan kerja sama dengan RSUP DR Wahidin Sudirohusodo sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tidak bisa dikatakan rasional dalam pengambilan keputusan.

Terdapat banyak faktor yang berperan dalam mendorong perkembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta. Keterbatasan akses terhadap sumberdaya yang dimiliki para aktor atau institusi dalam mewujudkan *publik values* dan *publik tasks* telah mendorong mereka untuk saling bekerjasama (Dwiyanto, 2010). Dengan melakukan kerjasama, kedua pihak berharap segala kekurangan yang dimiliki oleh kedua pihak dapat tertutupi dengan kelebihan yang juga dimiliki oleh masing-masing pihak yang bekerjasama.

Pihak swasta yang terlibat dalam bisnis perparkiran ini tidak menerima subsidi dari pemerintah sehingga tidak ada cara lain untuk tetap dapat berbisnis di bidang ini dan mendapatkan profit. Hal inilah yang perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaannya, sebab penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan akan menerapkan

tarif yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya.

V. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian tentang *public privat partnership* dalam pengelolaan parkir di kota Makassar (Studi kemitraan antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS) dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS membawa dampak baik dan saling menguntungkan dan pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.

Kedua, dibutuhkan regulasi dari pihak RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dalam penentuan kerjasama dengan pihak swasta. Regulasi tersebut terkait dengan aturan untuk melakukan proses tender serta melewati tim seleksi dan evaluasi kemitraan yang telah dibentuk oleh Bagian Hukum RSUP dan kemitraan.

Ketiga, perlunya pengawasan pengenaan tarif parkir yang tidak merugikan konsumen. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pengenaan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan tarif parkir yang telah disepakati.

Saran penelitian ini bahwa diperlukan regulasi yang tegas dari Pihak RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dalam penentuan kontrak dengan pihak swasta, serta penambahan lokasi parkir harus segera direalisasikan melihat lokasi parkir yang ada tidak mampu menampung volume kendaraan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Coleman J. S.(1994). *A rational Choice perspective on Economic Sociology*. Pp.166-180 in *the Handbook of Economic Sociology*, edited by Neil J. Smelser and Richard Swedberg.Princeton: Princeton University Press.
- Dwiyanto Agus. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- LitmanT.A. (2011). *Parking Management: comprehensive implementation Guide*. Victoria Transport Policy Institute.
- March James & Zur Shapira. (1992).”*Behavioral decision Theory and Organizational decision Theory*.” Pp.273-303 in *Decision making: alternatives to rational Choice Models*, edited by Mary Zey. Newbury Park: Sage.
- Osborne D,& Ted G.(1992).*Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Addison-Wesley.
- Parente W. J. (2006). ”*Public Private Partnerships*” dalam *Workshop on “Fundamental Principles and Techniques for Effective Public Privat e Partnerships in Indonesia”*, Jakarta.
- Saily Muthu.(2012). *Kemitraan Pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan pelayanan jasa transportasi laut*.Yogyakarta. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Sudibyo Sidiq. (2006). *Pelayanan air bersih melalui kemitraan pemerintah swasta*. Semarang. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Vestikowati Endah. (2012). *Model Kemitraan Pemerintah dengan Sektor Swasta dalam Pembangunan Daerah*.Yayasan Pendidikan Galuh pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh Ciamis.
- Zulfan. (2013). *Kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di kota Makassar*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.